

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK PEKON (BUM PEKON)  
DI PEKON PARDA HAGA KECAMATAN LEMONG  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**YATI MARYANI**



**JURUSAN AGRIBISNIS  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK PEKON (BUM PEKON) DI PEKON PARDA HAGA KECAMATAN LEMONG KABUPATEN PESISIR BARAT**

Oleh

**YATI MARYANI**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) Peranan *stakeholders* (Pemerintah Pekon, Pengurus BUM Pekon, Pengawas), 2) Tingkat partisipasi masyarakat, dan 3) Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode survei pada masyarakat Pekon Parda Haga di Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) secara sengaja (*purposive sampling*) terdiri dari pemerintah pekon, pengelola BUM Pekon, dan Pengawas BUM Pekon, 2) secara acak (*proporsional random sampling*) dengan total sampel sebanyak 46 responden. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan uji *Rank Spearman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan *stakeholders* dalam pengelolaan BUM Pekon Parda Haga telah dilakukan dengan cukup baik, tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan termasuk ke dalam klasifikasi sedang, faktor-faktor yang berhubungan kurang nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat adalah umur, tingkat pendapatan, dan luas lahan garapan, yang berhubungan nyata adalah tingkat pendidikan, dan yang berhubungan sangat nyata adalah motivasi anggota.

Kata kunci: Peranan, Partisipasi Masyarakat, Keuangan, BUM Pekon Parda Haga

## **ABSTRACT**

### **COMMUNITY PARTICIPATION IN THE MANAGEMENT OF PEKON- OWNED ENTERPRISES IN PARDA HAGA VILLAGE OF LEMONG SUBDISTRICT PESISIR BARAT DISTRICT**

**By**

**YATI MARYANI**

The purposes of this study are to find out: the roles of stakeholders, community participation rate, and, factors related to community participation rate. This study uses a survey method in the Pekon Parda Haga community in Lemong district of Pesisir Barat Regency. Samples were chosen in two ways, namely: purposive sampling consisting of the village officers, BUM Pekon managers, and supervisors of BUM Pekon; proportional random sampling totaling 46 respondents of communities who were actively involved in the BUM Pekon. The data analysis method uses a descriptive analysis and Rank Spearman test. The results showed that stakeholders in the management of BUM Pekon Parda Haga have conducted the roles quite well. The overall level of community participation was included in the medium category. Factors that were less significantly related to the level of community participation were age, income level, and land area; the factor more significantly related was the level of education; and factor most significantly related was the motivation of the members.

Key words: role, community participation, finance, BUM Pekon

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK PEKON (BUM PEKON)  
DI PEKON PARDA HAGA KECAMATAN LEMONG  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

Oleh

**YATI MARYANI**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA PERTANIAN**

Pada

Program Studi Penyuluhan Pertanian  
Jurusan Agribisnis  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung



**JURUSAN AGRIBISNIS  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**

Judul Laporan : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK  
PEKON (BUM PEKON) DI PEKON PARDA  
HAGA KECAMATAN LEMONG  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

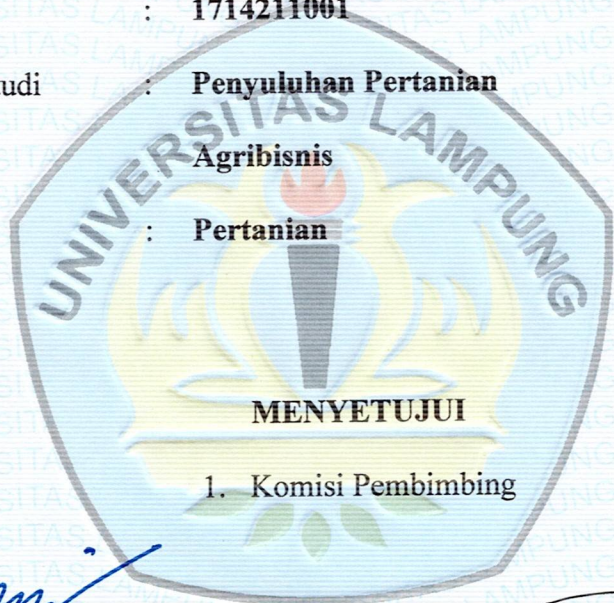
Nama Mahasiswa : **Yati Maryani**

NPM : **1714211001**

Program Studi : **Penyuluhan Pertanian**

Jurusan : **Agribisnis**

Fakultas : **Pertanian**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si.**  
NIP 19640327 199003 1 004

**Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.S.**  
NIP 19581111 198603 1 004

2. **Ketua Jurusan**

**Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.**  
NIP 19691003 199403 1 004

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si.**



Sekretaris

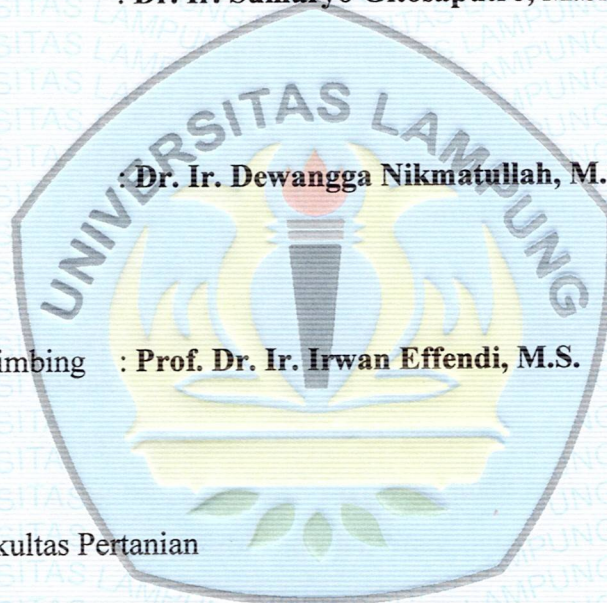
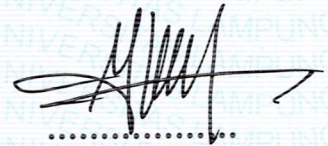
: **Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.S.**



Penguji,

Bukan Pembimbing

: **Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S.**

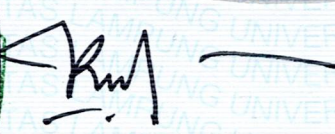


2. Dekan Fakultas Pertanian



**Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.**

NIP. 19611020 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Oktober 2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yati Maryani  
NPM : 1714211001  
Program Studi : S1 Penyuluhan Pertanian  
Jurusan : Agribisnis  
Fakultas : Pertanian  
Alamat : Pekon Way Batang, Kecamatan Lemong, Kabupaten  
Pesisir Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 05 November 2021  
Penulis,



Yati Maryani  
NPM 1714211001

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pekon Way Batang, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 07 Mei 1998 dari pasangan Bapak Mirzanni dan Ibu Ayatul Aini. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Dharma Wanita di Pekon Way Batang pada Tahun 2004, menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Way Batang pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pesisir Tengah pada Tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah pada Tahun 2017. Penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, Jurusan Agribisnis, Program Studi Penyuluhan Pertanian pada Tahun 2017 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis melaksanakan Praktik Pengenalan Pertanian (*Homestay*) di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2017. Pada Tahun 2020 Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sinar Mulyo, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Penulis juga melaksanakan Praktik Umum (PU) selama 30 hari kerja efektif di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2020. Penulis juga pernah menjadi Asisten Dosen mata kuliah Perubahan Sosial Tahun 2019/2020, Pengembangan Masyarakat Tahun 2020/2021, dan Sosiologi Perdesaan Tahun 2020/2021. Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung Penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, yaitu menjadi anggota bidang tiga Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (HIMASEPERTA) Tahun 2017/2019, Staf Ahli Badan Eksekutif Mahasiswa



Universitas Lampung (BEM Unila) Kementerian Pergerakan dan Pemberdayaan  
Wanita Tahun 2018/2019, dan Sekretaris Umum PMII Rayon Pertanian  
Komisariat Universitas Lampung Tahun 2019/2020.

## SANWACANA

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

*Alhamdulillahirobbilalamiin.* Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb pemilik semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan nikmat, kesehatan, kesempatan, kepercayaan dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) Di Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat”** dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW semoga menjadi ummat yang mendapatkan syafaatnya kelak di Yaumul Akhir Amiin. Skripsi ini tidak semata-mata hasil karya pribadi Penulis, tetapi banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih bantuan, nasihat, motivasi, dan saran-saran serta doa yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Agribisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ir. Sumaryo Gs, M.Si., selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan pengarahan, ilmu, bimbingan, masukan, dan saran kepada Penulis. Terima kasih atas saran, nasihat, dan semangat yang diberikan kepada Penulis.
4. Bapak Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.S., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan pengarahan, ilmu, bimbingan, dukungan, dan motivasi kepada Penulis selama penyusunan skripsi. Terima kasih atas saran, nasihat, dan semangat yang diberikan kepada Penulis.

5. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S., sebagai Dosen Penguji skripsi ini, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membangun kepada Penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini agar semakin baik. Terima kasih atas segala arahan dan masukannya.
6. Bapak Rio Teddy Prayitno, S.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan, nasihat, dan motivasi yang telah diberikan selama Penulis menjadi mahasiswa bimbingan akademik.
7. Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S., selaku Kepala Laboratorium Penyuluhan Pertanian Jurusan Agribisnis atas masukan, nasihat, dan kelancaran dalam verifikasi data untuk penyelesaian skripsi.
8. Seluruh dosen Jurusan Agribisnis atas semua ilmu, nasihat, dan bimbingan yang telah diberikan selama Penulis menjadi mahasiswa di Universitas Lampung.
9. Orang tua tercinta, Bapak Mirzanni dan Ibu Ayatul Aini serta adik-adik tersayang Khairil Candra, Alfia Mayantara, dan Sika Monatesa atas limpahan doa, semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengertiannya selama ini yang tidak akan tergantikan oleh apapun.
10. Bapak Solihan Nur, Husni Arifin, dan Hartoni serta saudara-saudari tercinta, Nguh Maria Liati, Mega Silvia, Udo Ferry Hadiansyah, Wo Fitri, Rosita Paramita, Wo Nora, Pakngah Irin, dan semua saudara lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan bantuan kepada Penulis.
11. Bapak dan Ibu Pengurus BUM Pekon Parda Haga, Pemerintah Pekon, dan Masyarakat yang telah membantu Penulis selama melakukan penelitian.
12. Sahabat-sahabat tercinta Ardi Yanti Kusuma, Suherti Armeilia, Yulya Sari, dan Titik Nur Fadhilah atas semangat, dukungan, dan bantuannya kepada Penulis.
13. Partner terbaik Ahmad Anjas Wara, S.P., terima kasih atas bantuan, dukungan, dan semangat kepada Penulis.
14. Teman-teman seperjuangan Nanda, Tias, Indah KN, Ragil, Amirul, Rio, Risa, Anam, Fifi, Indah Mur, Depa, Ferdy, Firman, Iqbal, terima kasih atas bantuan, semangat, dan motivasi kepada Penulis.

15. Teman-teman KKN Desa Sinar Mulyo tercinta, Elly, Fia, Algi, Adel, Vita, Deni, dan Bapak Hendro serta Ibu Nanik, terima kasih atas doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan kepada Penulis.
16. Keluarga Besar PMII Komisariat Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu, motivasi, dan semangat kepada Penulis.
17. Seluruh Karyawan di Jurusan Agribisnis, Mba Iin, Mba Vanesa, Mba Tunjung, Mas Ponco, Mas Boim, dan Mas Bukhori, serta rekan-rekan Agribisnis 2017-2019 terima kasih atas segala bantuannya.
18. Almamater tercinta dan seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian selama ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2021  
Penulis,

***Yati Maryani***

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	7
A. Partisipasi .....	7
1. Konsep Partisipasi .....	7
2. Tingkat Partisipasi .....	10
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi .....	12
B. Peranan <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan BUM Pekon .....	14
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	16
D. Pengelolaan BUM Pekon .....	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran .....	27
2.4 Hipotesis.....	29
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1 Definisi Operasional, Pengukuran Variabel, dan Klasifikasi.....	31
A. Definisi Operasional .....	31
1. Variabel X.....	32
2. Variabel Y.....	33
3.2 Penentuan Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian .....	37
3.3 Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel.....	37
3.4 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis .....	38

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum .....	41
A. Gambaran Umum Kecamatan Lemong .....	41
1.Keadaan Geografis Kecamatan Lemong .....	41
2.Keadaan Demografi Kecamatan Lemong.....	42
3.Keadaan Pertanian Kecamatan Lemong.....	43
4.Sarana dan Prasarana di Kecamatan Lemong.....	48
B. Gambaran Umum Pekon Parada Haga.....	49
1.Keadaan Geografis Pekon Parada Haga.....	49
2.Kondisi Ekonomi Pekon Parada Haga.....	50
3.Kondisi Kelembagaan Masyarakat.....	51
4.Kelembagaan Badan Usaha Milik (BUM) Pekon Parada Haga.....	51
C. Gambaran Umum Responden.....	54
1.Keadaan Umum Responden Berdasarkan Umur.....	54
2.Keadaan Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Formal.....	55
3.Keadaan Umum Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga.....	55
4.Keadaan Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	56
4.2 Pembahasan .....	58
A. Peranan <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik (BUM) Pekon Parada Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	58
1. Peranan Pemerintah Pekon Parada Haga (Dewan Komisaris) dalam Pengelolaan BUM Pekon Parada Haga .....	58
2. Peranan Pengurus dalam Pengelolaan Program BUM Pekon Parada Haga).....	60
3. Peranan Pengawas dalam Pengelolaan BUM Pekon Parada Haga.....	66
B. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Badan Milik (BUM) Pekon Parada Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Usaha.....	67
1.Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan .....	68
2.Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan.....	70
3.Tingkat Partisipasi dalam Penilaian dan Evaluasi.....	73
4.Tingkat Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil.....	74
C. Deskripsi Variabel X (Faktor-Faktor yang Diduga Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik (BUM) Pekon Parada Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).....	78
1. Umur Anggota ( $X_1$ ) .....	78
2. Tingkat Pendidikan Formal Anggota ( $X_2$ ) .....	79
3. Tingkat Pendapatan Anggota ( $X_3$ ).....	80
4. Motivasi Anggota ( $X_4$ ) .....	81
5. Luas Lahan Garapan ( $X_5$ ).....	82
D. Hasil Pengujian Hipotesis .....	83
E. Keuangan BUM Pekon Parada Haga.....	89

<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>93</b>
5.1 Simpulan .....	93
5.2 Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Ringkasan penelitian terdahulu .....	24
2. Batasan operasional dan pengukuran variabel X .....	32
3. Batasan operasional dan pengukuran variabel Y partisipasi dalam pengelolaan program BUM Pekon Parda Haga .....	35
4. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kecamatan Lemong 2019	42
5. Jenis-jenis usaha jasa sewa yang ada di BUM Pekon Parda Haga ...	53
6. Keadaan responden berdasarkan umur .....	54
7. Keadaan responden berdasarkan pendidikan formal .....	55
8. Keadaan responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga .....	56
9. Keadaan responden berdasarkan pekerjaan utama.....	56
10. Keadaan responden berdasarkan pekerjaan sampingan .....	57
11. Tugas dan fungsi pemerintah Pekon Parda Haga dalam mendukung program BUM Pekon Parda Haga .....	58
12. Tugas dan fungsi manajer BUM Pekon Parda Haga dalam melakukan pengelolaan program BUM Pekon Parda Haga.....	61
13. Tugas dan fungsi bendahara BUM Pekon Parda Haga dalam melakukan pengelolaan program BUM Pekon Parda Haga.....	63
14. Tugas dan fungsi sekretaris BUM Pekon Parda Haga dalam melakukan pengelolaan program BUM Pekon Parda Haga.....	65
15. Tugas dan fungsi pengawas dalam mendukung program BUM Pekon Parda Haga .....	66
16. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik (BUM) Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat .....	68
17. Sebaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan program BUM Pekon Parda Haga .....	69
18. Sebaran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program BUM Pekon Parda Haga .....	71



19. Sebaran partisipasi masyarakat dalam penilaian dan evaluasi kegiatan program BUM Pekon Parda Haga.....	73
20. Sebaran partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil kegiatan program BUM Pekon Parda Haga .....	75
21. Sebaran partisipasi masyarakat berdasarkan keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam program kegiatan BUM Pekon Parda Haga .....	76
22. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendapatan anggota BUM Pekon Parda Haga .....	80
23. Sebaran responden berdasarkan tingkat motivasi anggota BUM Pekon Parda Haga .....	81
24. Sebaran responden berdasarkan luas lahan garapan anggota BUM Pekon Parda Haga .....	82
25. Rekapitulasi hasil uji korelasi antara Variabel X dan Variabel Y .....	84
26. Kategori variabel X koefisien korelasi <i>Rank Spearman</i> .....	84
27. Keuangan BUM Pekon Parda Haga tahun 2017-2020 .....	90
28. Identitas Responden .....	102
29. Variable X (faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon) .....	105
30. Variable Y (partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon) .....	108
31. Motivasi anggota BUM Pekon (X4) (MSI) .....	111
32. Variable Y (partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon Parda Haga) (MSI) .....	113
33. Data uji korelasi <i>Rank Spearman</i> .....	119
34. Hasil uji setelah dilakukan MSI.....	122

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	30
2. Kegiatan wawancara bersana Aparat Pekon Parda Haga.....	124
3. Kegiatan wawancara tahap 1 bersama Pengurus BUM Pekon Parda Haga .....	124
4. Kegiatan wawancara bersama Pengawas BUM Pekon Parda Haga .	125
5. Kegiatan wawancara bersama Bapak Alamsyah (Mantan Peratin Pekon Parda Haga).....	125
6. Kegiatan wawancara bersama masyarakat Pekon Parda Haga .....	126

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang di dalamnya terdapat banyak pulau. Pada setiap pulau selain perkotaan juga memiliki desa yang beragam. Menurut Undang- Undang No. 06 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sesuai dengan adat setempatnya yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) mencatat bahwa jumlah desa pada tahun 2014-2019 yang dihitung berdasarkan lembah, lereng, dan daratan berjumlah 83.813 desa. Jumlah desa yang banyak ini menyebabkan permasalahan dalam pembangunan di Indonesia yaitu sulitnya dalam melakukan pemerataan pembangunan yang sesuai dengan porsinya. Hal ini tentu menyebabkan kesejahteraan di berbagai desapun sulit dirasakan serta masih terdapat ketimpangan sosial.

Pemerintah Indonesia saat ini sangat memperhatikan pembangunan di setiap desa. Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, desa diposisikan sebagai kekuatan besar yang akan mewujudkan “NAWACITA” yang ketiga yaitu membangun desa dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa. Menurut Putra (2015), membangun desa dari pinggiran yaitu dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai langkah awal dalam mewujudkan “NAWACITA” Jokowi-JK. BUMDes merupakan sebuah usaha

desa atau lembaga ekonomi desa yang dibentuk oleh pemerintah desa atas dasar inisiasi masyarakat desa sesuai dengan potensi desa (Ramadana *et al*, 2013).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipercaya sebagai langkah awal dalam membentuk kemandirian ekonomi desa dan menggerakkan berbagai unit usaha desa. Hal tersebut dilakukan karena ekonomi perdesaan adalah sentra utama untuk meningkatkan kemajuan pembangunan pedesaan. Pembentukan BUMDes diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di desa serta dapat melakukan pemerataan ekonomi dengan terciptanya beberapa usaha-usaha di desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Alkadafi (2014), yang menemukan bahwa BUMDes mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pengolahan potensi desa dan menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi masyarakat di desa. Selain itu, hasil BUMDes tersebut mampu memberikan tambahan kepada PADes (Pendapatan Asli Desa) sebesar 10% dari hasil laba BUMDes. Keberhasilan dalam menggerakkan roda perekonomian melalui BUMDes ini tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberlanjutan BUMDes, karena dengan adanya partisipasi masyarakat ini menunjukkan dukungan masyarakat dalam menciptakan pembangunan bukan melulu mendukung pembangunan.

Terdapat empat jenis partisipasi masyarakat menurut Nasution, (2009), yaitu (1) Tahap pengambilan keputusan, dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat pada perencanaan suatu kegiatan, (2) Tahap pelaksanaan, dikategorikan menjadi tiga yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program, (3) Tahap menikmati hasil, dengan semakin besarnya manfaat program yang dirasakan masyarakat desa berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran, (4) Tahap evaluasi, adanya umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. Menurut Subrata (dalam Jamal *et al*, 2018), bentuk partisipasi

diantaranya yaitu turut serta memberikan sumbangan finansial, sumbangan kekuatan fisik, sumbangan material, dan sumbangan moril (dukungan, saran, anjuran, nasehat, petuah, amanat, dan lain sebagainya).

Keberhasilan pelaksanaan program BUMDes selain adanya faktor sosial yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Andini (2020) didukung oleh beberapa faktor diantaranya: 1) faktor sumber daya alam yang berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola potensi sumberdaya alam yang ada di desa dengan menerapkan strategi pengembangan BUMDes yang berkualitas sehingga potensi-potensi yang ada di Desa dapat berkembang dan mensejahterakan masyarakat, 2) faktor finansial yaitu adanya dukungan dari pemerintah, mulai dari Pengalokasian Dana Desa (DD) dari Pemerintah pusat (APBN) melalui penyertaan modal APBDes, 3) faktor sumberdaya manusia, yaitu peranan pengelola BUMDes yang cukup berkualitas, 4) dan faktor kepemimpinan yang peduli terhadap BUMDesa untuk menerapkan Pengelolaan BUMDesa yang transparan dan akuntabel.

Adanya dukungan dari faktor sosial yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, faktor sumberdaya alam yaitu pemanfaatan potensi yang ada di desa, faktor finansial yaitu dukungan dari pemerintah, faktor sumberdaya manusia yaitu pengelola atau pengurus BUMDes, dan faktor kepemimpinan yang sangat peduli terhadap BUMDes akan mampu mewujudkan keberhasilan pada program BUMDes, sehingga dapat menjadikan BUMDes yang ada di desa mampu membantu perekonomian desa dan dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang telah mendirikan BUMDes di beberapa wilayah perdesaan yang tersebar di 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Adapun jumlah BUMDes di Provinsi Lampung sebanyak 2.072 BUMDes dengan status BUMDes aktif sebanyak 882 BUMDes (Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Lampung, 2020). Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten termuda di Provinsi Lampung dengan jumlah BUMDes

paling sedikit yaitu 50 BUMDes yang terletak di sembilan kecamatan (Dinas Pemberdayaan Pekon Kabupaten Pesisir Barat, 2020). Kecamatan Lemong termasuk salah satu kecamatan yang sudah membentuk BUMDes di beberapa desa/pekon. Salah satu desa yang telah membentuk BUMDes adalah Pekon Parda Haga, yang berada di Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Nama lain dari desa khususnya di wilayah Kabupaten Pesisir Barat adalah Pekon. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan Aparatur Pemerintah Pekon Kabupaten Pesisir Barat dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa secara nasional nama Badan Usaha Milik Desa adalah BUMDes. Namun, secara lokal khususnya di wilayah Kabupaten Pesisir Barat disesuaikan menjadi Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) dan Peraturan Perundang-Undangan masih mengikuti Peraturan Perundang-Undangan BUMDes secara nasional.

BUM Pekon Parda Haga sudah terbentuk sejak tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pekon Parda Haga No. 06 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon), namun mulai aktif kegiatannya yaitu pada tahun 2017. Dari 116 pekon yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, baru ada 50 pekon yang sudah memiliki BUM Pekon dan kegiatannya sudah berjalan. BUM Pekon yang ada di Kabupaten Pesisir Barat memiliki program yang beragam seperti jual beli hasil pertanian, perdagangan, pariwisata, simpan pinjam, usaha perikanan serta jasa sewa alat lainnya, dan disesuaikan dengan potensi yang ada di desa. Adanya BUM Pekon merupakan suatu wadah bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu perekonomian desa. Keberadaan BUM Pekon “Parda Haga” dari tahun 2016 hingga sekarang masih aktif dan memiliki usaha di bidang jasa sewa. BUM Pekon tersebut memberikan jasa sewa mulai dari alat pertanian (mesin perontok padi), molen (alat pengaduk semen), tarub, kursi, dan panggung pelaminan. Pemasukan yang didapatkan dari usaha jasa sewa alat

tersebut sudah memberikan pendapatan bagi BUM Pekon Parda Haga. Namun dalam pengelolaan BUM Pekon “Parda Haga” belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat, serta peran dari pengurus dan pemerintah pekon belum terlihat jelas oleh masyarakat di BUM Pekon tersebut. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar peran dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUM Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan *stakeholders* (Pemerintah pekon, Pengurus BUM Pekon, dan Pengawas) dalam pengelolaan BUM Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?
3. Apa faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan BUM Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirumuskan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan *stakeholders* (Pemerintah pekon, Pengurus BUM Pekon, dan Pengawas) dalam pengelolaan BUM Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat semua pihak antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa, peneliti, hingga masyarakat secara umum sebagai khazanah keilmuan khususnya terkait tentang partisipasi masyarakat, dan peranan *stakeholders* dalam pengelolaan BUM Pekon.
2. Dapat memberikan informasi, wawasan, dan juga pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, serta memberikan manfaat positif baik bagi Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) maupun pemerintah Pekon Parada Haga agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan pelayanan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

#### **A. Partisipasi**

##### **1. Konsep Partisipasi**

Partisipasi merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan dan membantu kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi tidak hanya bagaimana individu bisa ikut serta dalam kegiatan, tetapi partisipasi adalah bagaimana agar individu dapat turut serta dalam merancang kegiatan dan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan (Seomarto dan Hetifah, 2009).

Mikkelsen (1999), membagi partisipasi menjadi enam pengertian yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (pembuatan peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.

- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Mardikanto (1993) mengartikan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian partisipasi tersebut mendukung maksud bahwa keikutsertaan masyarakat atau petani dalam pembangunan pertanian karena adanya kesadaran dirinya dalam diri individu bukan adanya paksaan dari pihak luar.

Menurut Slamet, (1980 dalam Gitosaputro dan Rangga, 2015) partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:

- a. Ikut memberi masukan kedalam pembangunan yang dapat berupa bantuan tenaga, materi, dana, keahlian, gagasan, alternatif dan keputusan.
- b. Mendapat keuntungan atau imbalan dari adanya proses pembangunan.
- c. Ikut menikmati hasil pembangunan seperti yang dimaksud oleh tujuan pembangunan tersebut.

Ndraha (1990), juga mengemukakan bentuk atau tahapan partisipasi:

- a. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati,

memenuhi, melaksanakan), menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.

- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Termasuk pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu dibutuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka dan partisipasi yang bersifat teknis.

Menurut Uphoff *et al* (1979), mengatakan bahwa akan lebih baik jika setiap partisipan terlibat dalam setiap tahap partisipasi. Tahap partisipasi yang dimaksud tersebut adalah:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tahap ini partisipan ikut serta dan aktif dalam rapat, menyumbang pemikiran dan memberikan tanggapan ataupun penolakan terhadap keputusan suatu program.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program, tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling penting demi subuah kelanjutan suatu program pembangunan. Partisipasi yang diberikan oleh partisipan dapat berwujud tenaga, barang, uang maupun informasi.
- c. Partisipasi dalam menikmati hasil, tahap ini merupakan bentuk keberhasilan dari tahap perencanaan dan pelaksanaan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat melihat dari tiga aspek yaitu material, manfaat sosial dan manfaat pribadi.
- d. Partisipasi dalam penelitian atau evaluasi, pada tahap ini partisipan dapat memberikan masukan demi perbaikan sebuah program pembangunan yang sudah berjalan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yaitu keterlibatan aktif dari seseorang individu atau anggota BUM Pekon secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam kegiatan pengelolaan program BUM Pekon Parada Huga. Keterlibatan atau

keikutsertaan masyarakat atau anggota BUM Pekon dalam pengelolaan program BUM Pekon dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian atau evaluasi, dan pemanfaatan program. Bentuk dari partisipasi masyarakat atau anggota BUM Pekon dapat berupa jasa, saran, maupun dalam bentuk materi baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

## **2. Tingkat Partisipasi**

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam suatu program, salah satunya yaitu pengelolaan program BUM Pekon. Dalam berpartisipasi tentunya memerlukan sebuah proses untuk dapat terlibat pada suatu program ataupun kegiatan di masyarakat. Untuk membedakan prosesnya maka diperlukan tangga atau tingkatan partisipasi. Teori tingkat partisipasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembobotan terhadap tolak ukur tingkat partisipasi masyarakat. Pengelompokan tingkat partisipasi masyarakat menurut Sumarto, (2003) terdapat tiga bagian yaitu:

### **a. Tinggi**

1. Inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan secara mandiri mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan, bahkan termasuk penganggarannya.
2. Masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, akan tetapi mereka juga menentukan program-program yang akan dilaksanakan.
3. Masyarakat yang termarginalkan ikut berpartisipasi dan tidak lagi didominasi pihak-pihak tertentu.
4. Kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam program semakin luas.

5. Proses konsultasi kepada masyarakat semakin diperluas dan menyentuh segala aspek secara keseluruhan.
- b. Sedang
1. Masyarakat sudah ikut berpartisipasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih didominasi golongan tertentu.
  2. Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas pada masalah keseharian.
  3. Dialog antar komponen *civil society* terbentuk, tetapi belum menyentuh masalah yang riil.
  4. Komponen *civil society* berpartisipasi aktif tetapi bagi kelompok masyarakat masih dipertanyakan tingkat representasinya.
- c. Rendah
1. Masyarakat hanya menyaksikan kegiatan proyek yang dilakukan oleh pemerintah.
  2. Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara langsung atau melalui media massa, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan.
  3. Pemerintah meminta konfirmasi kepada masyarakat tidak lebih konfirmasi, bukan untuk meminta persetujuan.
  4. Masyarakat sangat bergantung kepada dana dari pihak lain sehingga apabila dana berhenti, maka kegiatan secara stimulan akan terhenti juga.

Pengukuran tingkat partisipasi menurut Chapin (dalam Chusnah, 2008), dapat dilakukan dengan cara mengukur tingkat partisipasi individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama dengan skalanya. Menurut Chapin skala partisipasi dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap kriteria-kriteria tingkat partisipasi sosial yaitu:

- a. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial.
- b. Kehadiran dalam pertemuan.
- c. Membayar iuran/sumbangan.
- d. Keanggotaan di dalam kepengurusan.

e. Kedudukan di dalam kepengurusan.

Pendapat lain yang diusulkan oleh Club Du Sahel (dalam Khadiyanto, 2007), menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu terlebih dahulu mengetahui tingkat partisipasi masyarakat. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi Pasif, Pelatihan dan Informasi. Partisipasi ini merupakan tipe komunikasi satu arah seperti komunikasi searah antara guru dan muridnya.
- b. Partisipasi aktif. Partisipasi ini merupakan dialog dan komunikasi dua arah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan petugas penyuluhan dan pelatihan diluar.
- c. Partisipasi dengan keterkaitan masyarakat setempat baik pribadi maupun kelompok diberi pilihan untuk bertanggung jawab atas setiap kegiatan masyarakat maupun proyek.
- d. Partisipasi atas permintaan setempat. Kegiatan proyek lebih berfokus pada menjawab kebutuhan masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan oleh orang luar.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yaitu proses keterlibatan aktif dari seseorang individu atau anggota BUM Pekon secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam kegiatan pengelolaan program BUM Pekon Parada Huga. Proses keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat atau anggota BUMDes dalam pengelolaan program BUMDes dapat dilihat dari beberapa tingkatan partisipasi mulai dari tingkat berpartisipasi aktif atau tinggi, tingkat partisipasi sedang, dan tingkat partisipasi rendah.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Program BUM Pekon. Dari sifat faktor-faktor ini

dapat mendukung keberhasilan program, akan tetapi ada juga yang dapat menghambat dalam keberhasilan program, seperti usia, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon pada penelitian ini diambil dari berbagai pendapat dan hasil penelitian, diantaranya menurut Badra (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu : (1) pengetahuan tentang program, (2) frekuensi kegiatan penyuluhan, (3) motivasi petani, (4) sifat kosmopolit, sedangkan dari hasil penelitian Rahman (2011), faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat salah satunya yaitu luas lahan garapan.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan menurut Slamet (2003), mencakup usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan:

1. Usia merupakan lama hidup seseorang terhitung dari tahun dilahirkan hingga tahun saat ia hidup. usia diharapkan dapat mempengaruhi partisipasi individu atau kelompok dapat menyampaikan pendapat atau idenya. Usia juga menentukan seseorang untuk dapat mengambil kebutuhan. Usia tua dianggap memiliki pengalaman yang lebih banyak sehingga cenderung memiliki pendapat yang lebih besar (Ainiya, 2014).
2. Tingkat pendidikan  
Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang diterima seseorang yang memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta penganan baik secara formal maupun informal. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi partisipasi, karena pengetahuan luas yang dimiliki individu cenderung memberikan pendapat yang lebih banyak, sehingga tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi (Ainiya, 2014)
3. Tingkat pendapatan  
Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh individu setelah bekerja. Pendapatan dibagi menjadi pendapatan harian, mingguan

dan bulanan. Tingkat pendapatan seseorang mempengaruhi partisipasi, berupa dana, sementara individu yang memiliki penghasilan yang memiliki pendapat rendah cenderung akan ikut berpartisipasi rendah atau pikiran. Individu yang memiliki pendapatan yang rendah cenderung memiliki partisipasi yang tinggi dalam kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan dirinya (Ainiya, 2014).

Munurut Tjokroamidjojo (1995: 226) mengatakan hal yang sama. Namun, ada 2 elemen lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu :

1. Kepemimpinan, peran kepemimpinan suatu bangsa adalah sangat menentukan. Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk sebuah pembangunan diperlukan pemimpin-pemimpin informal yang memiliki legitimasi.
2. Tingkat komunikasi. Gagasan-gagasan kebijakan dan rencana hanya akan dapat dukungan bila diketahui dan dimengerti. Hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kemudian diterima dengan pengertian masyarakat, bahwa hasil dari kebijakan rencana itu akan betul-betul dapat dipetik oleh masyarakat.

## **B. Peranan *Stakeholders* dalam BUM Pekon**

Peranan berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat, sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial (Suhardono, 1994). Definisi peranan menurut Soerjono Soekanto yaitu Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan



(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka iya menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002).

Peran *stakeholders* dalam BUM Pekon dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing *stakeholders* yang ada dalam BUM Pekon Parada Haga sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Pekon Parada Haga. Peranan penasehat atau pemerintah pekon tertulis dalam AD/ART BAB III Tentang Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengelola/pengurus pasal 4 ayat (2) dan (3) yaitu memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Pekon Parada Haga, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Pekon, mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Pekon, dan melindungi usaha BUM Pekon terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Pekon. Peranan atau tugas dan kewajiban pengurus BUM Pekon dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) yaitu melaksanakan dan mengembangkan BUM Pekon Parada Haga agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat pekon, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi pekon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Pekon, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian pekon lainnya, membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Pekon setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Pekon setiap bulan, dan memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Pekon kepada masyarakat pekon melalui musyawarah pekon sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Peranan pengawas yaitu melaksanakan musyawarah/rapat umum untuk membahas kinerja BUM Pekon sekurang-kurangnya satu tahun sekali, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Pekon, pemilihan dan pengangkatan pengawas, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Peranan pengurus Badan Usaha Milik Pekon di Pekon Gisting Bawah berdasarkan hasil penelitian Aldila *et al*, (2018) mengacu pada tugas pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu pada AD-ART yang telah ditetapkan yaitu melakukan pelayanan kebutuhan ekonomi masyarakat, memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Pekon Gisting Bawah, menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi pekon, dan memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat pekon.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran yaitu tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, sedangkan peranan *stakeholders* BUM Pekon dalam sebuah pekon berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat pekon serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Peranan BUM Pekon dapat berhasil jika didukung oleh adanya peranan dari pengelola BUM Pekon, pemerintah pekon, dan masyarakat yang terlibat secara aktif dalam pengelolaan BUM Pekon.

### **C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

#### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Kamaroesid, 2016). BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan

mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes (Dewi, 2014).

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan

masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

## 2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan (Kamaroesid, 2016).

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.

## 3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

#### 4. Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (kooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

## 5. Keuangan BUMDES

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana

untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

#### 6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDES

Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES kepada penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDES. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDES kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

#### 7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

- a. BUMDES *Banking*. BUMDES yang bertipe *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.
- b. BUMDES *Serving*. BUMDES *Serving* ,mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAM Des.
- c. BUMDES *Brokering* dan *Renting*. Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran rekening listrik, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri.
- d. BUMDES *Trading*. BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah

bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.

#### **D. Pengelolaan BUM Pekon**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu, jadi pengelolan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberi pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter dan Yenny, 2002).

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertibkan, pemeliharaan, pengaturan secara sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi, pengelolaan merupakan tindakan mengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan atau prasarana yang ada dalam organisasi, pengelolaan bidang keuangan atau dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya (Depertemen pendidikan dan Kebudayaan, 1995). Salah satunya berkaitan dengan pengelolaan dalam program BUMDes yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penilaian, dan tahap pemanfaatan hasil dari program BUMDes tersebut.

Menurut Permendagri No 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang ditentukan atau didirikan oleh pemerintah desa yang mana pengelolaan dan permodalannya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan juga masyarakat desa. Tujuan dari pendidikian BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Pendirian BUMDes berlandaskan pada UU No. 6 Tahun 2014 dalam BAB X pasal



87-90 yang menjelaskan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan asas dan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan (Prasetyo, 2016 dalam Mutolib, 2019).

BUMDes memiliki dua fungsi utama dalam desa yaitu sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial yang memiliki makna bahwa BUMDes bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya lokal desa untuk meningkatkan pendapatan desa, kemudian sebagai lembaga sosial BUMDes memiliki peran dan berkontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial masyarakat (Wijanarko, 2012).

Jenis usaha yang dikelola dan dikembangkan BUMDes telah diatur dalam Permen (Peraturan Menteri) yang meliputi usaha jasa, perdagangan hasil pertanian, penyaluran atau distribusi bahan pokok dan industri rumah tangga skala kecil. Adapun jenis usaha yang dikembangkan oleh BUM Pekon Parada Haga diantaranya yaitu usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha perikanan, usaha jasa transportasi, dan usaha kerajinan. Untuk jenis usaha yang sudah berjalan dan masih dikelola hingga sekarang oleh BUM Pekon Parada Haga yaitu usaha jasa sewa alat pertanian, sewa tarub, sewa alat pelaminan, sewa molen. Salah satu yang menjadi alasan usaha jasa tersebut masih berjalan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Perkembangan dan kemajuan BUM Pekon tidak lepas dari dukungan pemerintahan desa sebagai pemilik BUM Pekon. Pemerintahan desa berperan dalam pengembangan BUMDes karena sejatinya BUM Pekon merupakan pemilikan modalnya harus sebagian besar dari dana desa, sehingga kebijakan pemerintah desa dalam alokasi dana desa untuk pengembangan BUM Pekon akan mempengaruhi sejauh mana kemajuan BUM Pekon. Semakin besar komitmen pemerintahan Desa dan besaran dana desa yang dialokasikan untuk BUM Pekon akan besar pula potensi keberhasilan BUM Pekon.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat di pekon dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Sumber	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Batubara, R.H., I., Effendi, dan R.T., Prayitno (2016)	Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis (JIIA) Volume 4, No. 1	Partisipasi Masyarakat dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GMSK) di Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang	Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengambilan data yaitu <i>random sampling</i> dan metode analisis data yaitu menggunakan korelasi <i>Rank Spearman</i>	Hasil Penelitian menunjukkan faktor-faktor yang memiliki hubungan nyata dengan tingkat partisipasi petani dalam GMSK yaitu berhubungan erat dengan tingkat peran Pokmas dalam mengelola Program GSMK, terutama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan menghimpun swadaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi peranan Pokmas maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat.
2	Kasila, M., dan L. M., Kolopaking (2018)	Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)	Partisipasi Pemuda Desa dalam Perkembangan Usaha BUMDES “Tirta Mandiri” (Studi di Desa	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan didukung data kualitatif. Analisis data menggunakan uji korelasi <i>Rank Spearman</i>	Tingkat partisipasi pemuda dalam BUMDes paling tinggi berada pada tahap pelaksanaan. Faktor yang memiliki hubungan terhadap tingkat partisipasi pemuda yaitu tingkat komunikasi. Tingginya tingkat partisipasi pemuda memberikan kemajuan terhadap

Tabel 1. Lanjutan

		Vol 2 (1):43-48 ISSN: 2338-8021; E-ISSN: 2338-8269	Ponggok, Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah		perkembangan BUMDes “Tirta Mandiri” dari segi kelembagaan, kemampuan anggota dan perluasan pasar produk.
	I.M.T., Yama, S., Gitosaputro, dan T., Hasanuddin (2018)	Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis(JII A) Volume 6, No. 1	Partisipasi Petani Padi dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah	Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif, untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji korelasi <i>Rank Spearman</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kinerja Program P2BN dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan keuntungan di Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah tergolong Tinggi. Tingkat partisipasi petani dalam Program P2BN tergolong sedang. Faktor berhubungan secara signifikan dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan Program P2BN adalah pengetahuan tentang program P2BN dan dukungan sosial.
4	Mokoagow, H., A.M., Maweikere, dan M.M., Sendow (2020)	Jurnal AGRIRUD Volume 2, No. 1 (45-54)	Partisipasi Masyarakat Dalam BUMDES di Desa Bulawan II Kecamatan Kotabunan Kabupaten Boolang Mongondow Timur	Metode pengumpulan data yaitu metode survey dengan pengambilan data primer dan sekunder. Metode pengambilan sampel dengan metode <i>sampel random sampling</i> . Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat responden dalam BUMDES tergolong masih rendah dengan jumlah rata-rata delapan responden dengan persentase 20% yang telah berpartisipasi dan 32 responden rata-rata dengan persentase 80% tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan Program BUMDes ayam petelur. Penyebabnya adalah kurangnya pemberitahuan atau informasi dari pengurus

Tabel 1. Lanjutan

					BUMDes kepada masyarakat.
5	Maulidiawati, D., D., Nikmatullah, dan R.T., Prayitno (2018)	Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis (JIIA) Volume 6, No. 1	Partisipasi Petani dalam Program Upsus Pajale di Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang	Metode penelitian ini dilakukan dengan metode survei dan analisis data menggunakan analisis deskriptif dan uji korelasi <i>Rank Spearman</i>	Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi petani dalam Program Upsus Pajale meliputi produksi, perilaku komunikasi kelompok, dan intensitas sosialisasi program. Secara keseluruhan tingkat partisipasi petani dalam Program Upsus Pajale di Kecamatan Rawa Jitu Selatan adalah Sedang (48,15%).
6	Pratiwi, E., I.N., Sujana, dan I.A., Haris (2019)	Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Volume 11, No. 1 p-ISSN : 2599 - 1418 e-ISSN : 2599 – 1426	Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDes Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem	Metode pengambilan data menggunakan <i>random sampling</i> dengan metode wawancara dan kuisioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap program kerja BUMDes Dwi Amertha Sari Jinengdalem dikategorikan setuju hal ini dapat dilihat dari tiga dimensi yakni : dimensi pelaku persepsi ,objek yang dipersepsikan dan konteks dari situasi persepsi itu dilakukan jawaban responden dikategorikan Setuju, dan partisipasi masyarakat terhadap program kerja BUMDes Dwi Amertha Sari Jinengdalem dikategorikan tinggi hal ini dapat dilihat dari dua dimensi yakni dimensi perencanaan program kerjadan b) dimensi pelaksanaan program kerja jawaban responden dikategorikan Tinggi

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Proses pengelolaan BUM Pekon tentunya memerlukan keterlibatan peranan dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan badan usaha. Peranan *stakeholders* (Pemerintah Pekon, Pengelola BUM Pekon dan Masyarakat) dalam BUM Pekon dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing *stakeholders* yang ada dalam BUM Pekon Parda Haga sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Pekon Parda Haga. Peranan penasehat atau pemerintah pekon tertulis dalam AD/ART BAB III Tentang Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengelola/pengurus pasal 4 ayat (2) dan (3) yaitu memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Pekon Parda Haga, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Pekon, mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Pekon, dan melindungi usaha BUM Pekon terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Pekon. Peranan atau tugas dan kewajiban pengurus BUM Pekon dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) yaitu melaksanakan dan mengembangkan BUM Pekon Parda Haga agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat pekon, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi pekon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Pekon, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian pekon lainnya, membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Pekon setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Pekon setiap bulan, dan memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Pekon kepada masyarakat pekon melalui musyawarah pekon sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Peranan pengawas yaitu melaksanakan musyawarah/rapat umum untuk membahas kinerja BUM Pekon sekurang-kurangnya satu tahun sekali, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Pekon, pemilihan dan pengangkatan pengawas, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Peranan pengurus Badan Usaha Milik Pekon di Pekon Gisting Bawah berdasarkan hasil penelitian Aldila *et al*, (2018) mengacu pada tugas pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu pada AD-ART yang telah ditetapkan yaitu melakukan pelayanan kebutuhan ekonomi masyarakat, memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Pekon Gisting Bawah, menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi pekon, dan memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat pekon.

Proses selanjutnya yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program BUM Pekon. Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar (Ndraha, 1990). Bentuk partisipasi seseorang dapat disampaikan melalui rapat anggota kelompok atau pertemuan-pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal.

Keberhasilan program BUMDes sangat dipengaruhi oleh adanya keterlibatan langsung anggota BUMDes dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada wilayah pekon tersebut. Untuk melihat tingkat partisipasi seseorang atau masyarakat mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Ndraha (1990), empat indikator partisipasi tersebut meliputi: (1) partisipasi dalam perencanaan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan program, (3) partisipasi dalam penilaian, dan (4) partisipasi dalam pemanfaatan. Partisipasi dalam sebuah program pembangunan, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: 1) umur, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ainiya, 2014 menyebutkan bahwa umur berhubungan dengan partisipasi masyarakat karena umur menentukan seseorang untuk dapat mengambil keputusan dan usia tua dianggap memiliki pengalaman yang lebih banyak sehingga cenderung memiliki pendapat yang lebih besar. 2) tingkat pendidikan, juga berhubungan dengan partisipasi masyarakat karena pengetahuan luas yang dimiliki individu cenderung memberikan pendapat yang lebih banyak, sehingga tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi. 3) tingkat pendapatan, memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat karena individu yang memiliki pendapat rendah cenderung akan ikut berpartisipasi

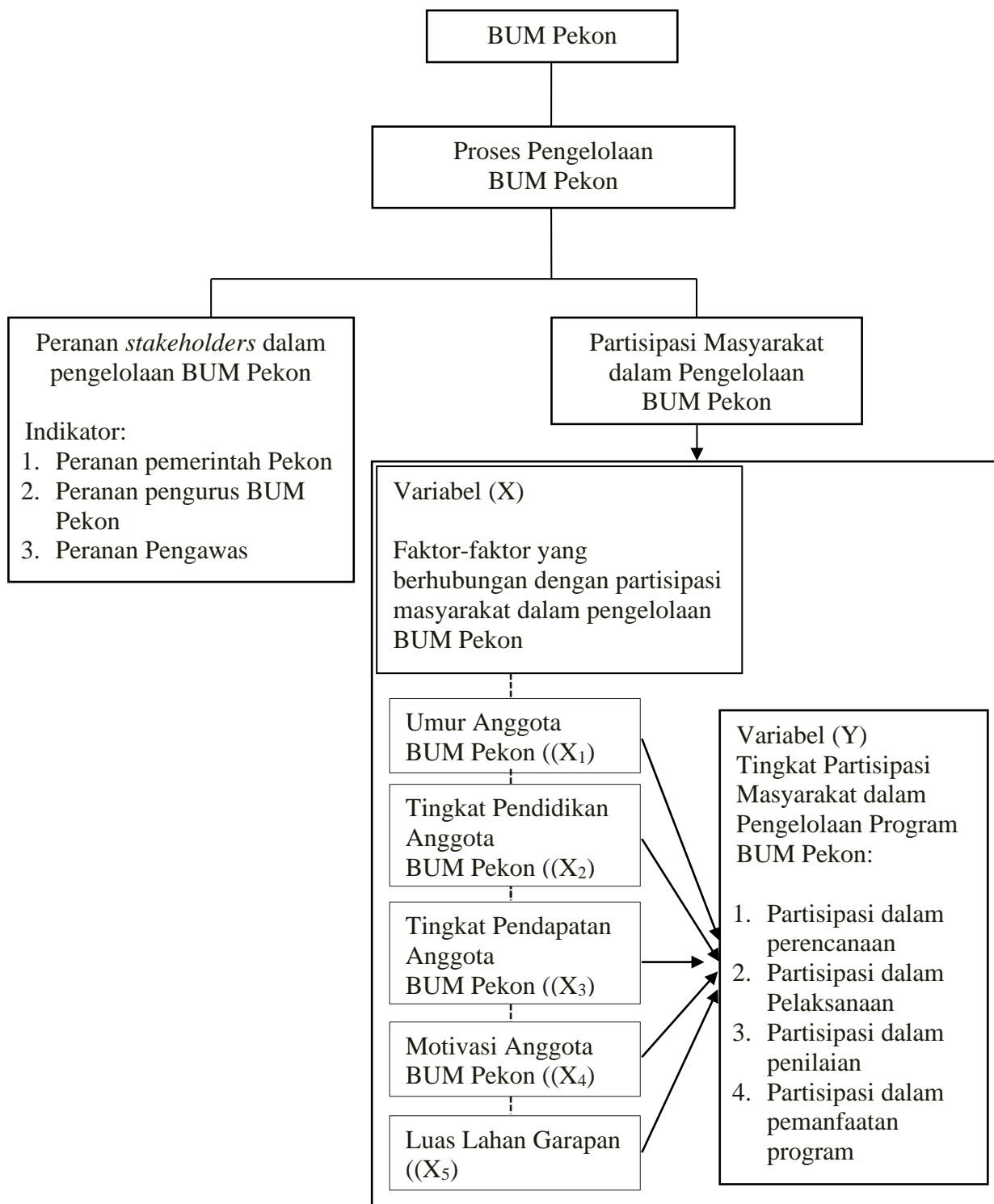
rendah atau pikiran dan individu yang memiliki pendapatan yang rendah cenderung memiliki partisipasi yang tinggi dalam kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan dirinya. 4) Motivasi petani, berhubungan nyata dengan partisipasi petani padi sawah dalam program BLP (Bantuan Langsung Pupuk karena semakin tinggi tingkat motivasi petani dalam program BLP maka tingkat partisipasi petani juga akan semakin meningkat (Badra, 2011), dan 5) Luas lahan garapan, berhubungan dengan partisipasi petani dalam kegiatan rehabilitasi tanaman kakao, karena semakin luas lahan garapan maka partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi akan semakin meningkat (Azwar *et al*, 2016). Variabel-variabel tersebut dipilih karena sudah dianggap sesuai dengan kondisi di lapangan dan merupakan variabel yang diduga berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dilihat suatu hubungan antara variabel X diantaranya yaitu;  $X_1$  = Umur anggota BUMDes,  $X_2$  = Tingkat pendidikan formal anggota BUMDes,  $X_3$  = Tingkat pendapatan anggota BUMDes,  $X_4$  = Motivasi anggota BUMDes,  $X_5$  = Luas lahan garapan, dengan variabel Y (partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam penilaian, dan partisipasi dalam pemanfaatan), yang dapat dilihat pada Gambar 1.

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga ada hubungan yang nyata antara umur anggota, tingkat pendidikan formal anggota, tingkat pendapatan anggota, motivasi anggota, dan luas lahan garapan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon Parada Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.



Gambar 1. Kerangka pemikiran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) di Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

Keterangan:

→ : Hubungan variabel yang diuji



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional, Pengukuran Variabel, dan Klasifikasi**

##### **A. Definisi Operasional**

Pada penelitian ini, secara operasional dapat diuraikan tentang definisi operasional yang digunakan dan diteliti diantaranya yaitu:

- 1) Peranan pemerintah desa yaitu peranan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mendukung program BUM Pekon di Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong. Peranan tersebut mulai dari pemberian alokasi penyertaan modal dari Dana Desa setiap tahunnya dan mendukung program yang dijalankan oleh BUM Pekon Pardahaga.
- 2) Peranan pengelola BUM Pekon yaitu peranan pengurus BUM Pekon dalam melaksanakan dan mengembangkan BUM Pekon dengan menerapkan strategi yang berkualitas.
- 3) Peranan pengawas dalam BUM Pekon yaitu peranan yang dilakukan oleh pengawas dalam pemantauan dan evaluasi BUM Pekon Parda Haga.

Variabel X dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon yang terdiri dari  $X_1$  = Umur anggota BUM Pekon,  $X_2$  = Tingkat pendidikan formal anggota BUM Pekon,  $X_3$  = Tingkat pendapatan anggota BUM Pekon,  $X_4$  = Motivasi anggota BUM Pekon,  $X_5$  = Luas lahan garapan. Variabel Y pada

penelitian ini adalah fase perencanaan, fase pelaksanaan, fase penilaian, dan fase pemanfaatan program.

### 1. Variabel X

1. Umur anggota BUM Pekon ( $X_1$ ) menunjukkan lamanya responden hidup sejak dilahirkan sampai penelitian dilakukan, dan diukur dengan satuan tahun dan diklasifikasikan menjadi kelompok umur belum produktif, produktif, dan tidak produktif (Mantra 2004).
2. Tingkat pendidikan formal anggota BUM Pekon ( $X_2$ ) menunjukkan lamanya responden dalam menempuh pendidikan formal yang diukur dalam satuan tahun sukses dan diklasifikasikan menjadi dasar, menengah, dan atas berdasarkan data lapangan.
3. Tingkat pendapatan anggota BUM Pekon ( $X_3$ ) menunjukkan hasil yang diperoleh individu setelah bekerja. Pendapatan dibagi menjadi pendapatan harian, mingguan dan bulanan.
4. Motivasi anggota BUM Pekon ( $X_4$ ) menunjukkan dorongan dari luar dan dari dalam diri masyarakat untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai tujuan tertentu dan diukur dengan indikator pengetahuan seseorang mengenai Program BUM Pekon Parda Haga.
5. Luas lahan garapan ( $X_5$ ) menunjukkan areal atau tempat yang digunakan untuk melakukan usahatani di atas sebidang tanah yang diukur dengan satuan hektar (ha) dengan status lahan yang digarap oleh petani.

Tabel 2. Batasan operasional dan pengukuran variabel X

Variabel X	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran	Kategori
Umur anggota BUM Pekon ( $X_1$ )	Lamanya responden hidup sejak dilahirkan sampai penelitian dilakukan.	Usia seseorang yang mampu melakukan pekerjaan produktif	Tahun	a. >64 tahun; Kurang produktif b. 15-64 tahun; Produktif c. 0-14 tahun; Belum produktif
Tingkat pendidikan	Lamanya responden dalam	Pendidikan terakhir responden	Tahun	a. 12,68 – 16 ; Tinggi b. 9,34 – 12,67 ;

Tabel 2. Lanjutan.

formal anggota BUM Pekon (X <sub>2</sub> )	menempuh pendidikan formal				Menengah c. 6 – 9,33 tahun ; Rendah
Tingkat pendapatan anggota BUM Pekon (X <sub>3</sub> )	Hasil yang diperoleh responden setelah bekerja	Jumlah pendapatan yang diperoleh responden selama satu bulan	Rupiah (Rp)		a. (Rp.700.000 – 2.800.000); Rendah b. (Rp.2.900.000 – 5.000.000); Sedang c. Rp.5.100.000 – 7.200.000); Tinggi
Motivasi anggota BUM Pekon (X <sub>4</sub> )	Dorongan dari luar dan dari dalam diri individu untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga dapat mencapai tujuan	1. Siapa saja yang memberikan motivasi dari ruang lingkup keluarga 2. Siapa saja yang memberikan motivasi dari lingkungan sekitar	Skor		a. (12,91 – 22,22) : Rendah b. (22,23 – 31,54) ; Sedang c. (31,55 – 40,86) :Tinggi
Luas lahan garapan (X <sub>5</sub> )	Luas lahan yang digarap oleh petani untuk digunakan dalam berusaha tani diukur dengan satuan hektar	Luas areal tempat yang digunakan untuk usahatani	Hektar (ha)		a. 0,26 – 0,83 ha; Sempit b. 0,84 – 1,42 ha; Sedang c. 1,43 – 2,01 ha; Luas

## 2. Variabel Y

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon merupakan keikutsertaan masyarakat, pemerintah desa, dan pengelola BUM Pekon

dalam mengikuti program yang terdapat dalam BUM Pekon sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam program BUM Pekon tersebut dapat tercapai. Variabel Y adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon. Partisipasi masyarakat tersebut meliputi partisipasi pada tahap perencanaan, partisipasi pada tahap pelaksanaan program, partisipasi pada tahap penilaian dan partisipasi pada tahap pemanfaatan.

1. Partisipasi pada tahap perencanaan kegiatan adalah keterlibatan anggota BUM Pekon dalam perencanaan Program BUM Pekon. Partisipasi dalam perencanaan kegiatan dapat dilihat berdasarkan indikator yaitu :
  - a. Anggota BUM Pekon ikut serta dalam rapat pembuatan program BUM Pekon.
  - b. Anggota BUM Pekon ikut memberikan saran dan masukan dalam menyusun perencanaan.

Pengukuran tingkat partisipasi pada tahap perencanaan diketahui melalui dua pertanyaan kuisisioner yang kemudian diukur dengan satuan skor 3 - 1 dan diklasifikasikan menjadi berpartisipasi, cukup berpartisipasi, dan kurang berpartisipasi.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan adalah dilihat dari jumlah kehadiran anggota BUM Pekon dalam pelaksanaan kegiatan Program BUM Pekon. Partisipasi dalam pelaksanaan Program BUM Pekon dilihat berdasarkan indikator yaitu :
  - a. Ikut serta dalam mengikuti kegiatan BUM Pekon.
  - b. Pengambilan keputusan dalam menjalankan Program BUM Pekon.
3. Partisipasi dalam penilaian dan evaluasi program adalah anggota BUMDes melakukan penilaian dalam kegiatan Program BUM Pekon. Partisipasi dalam penilaian Program BUM Pekon dapat dilihat berdasarkan indikator yaitu :
  - a. Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan
  - b. Memberikan penilaian terhadap laporan Program BUM Pekon.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan adalah anggota BUM Pekon dalam memanfaatkan hasil kegiatan Program BUM Pekon. Partisipasi anggota kelompok tani dalam pemanfaatan hasil dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut :
- Anggota BUM Pekon menikmati hasil yang diperoleh dari Program BUM Pekon.
  - Anggota BUM Pekon mendapatkan hasil dari program BUM Pekon sesuai dengan tujuan.

Tabel 3. Batasan operasional dan pengukuran variabel Y partisipasi dalam pengelolaan program BUM Pekon Parda Haga

Variabel Y	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran	Klasifikasi
Tingkat partisipasi dalam perencanaan kegiatan program BUM Pekon	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program BUM Pekon dengan melihat berdasarkan keikutsertaan dalam rapat dan memberikan saran serta masukan.	1. Anggota BUMDes ikut serta dalam rapat pembuatan program BUM Pekon. 2. Anggota BUM Pekon ikut memberikan saran dan masukan dalam menyusun perencanaan	Skor	a. (23,88 – 31,30); Tinggi b. (16,44 – 23,87); Sedang c. (9,00 – 16,43); Rendah
Tingkat partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan program BUM Pekon	Jumlah kehadiran anggota BUM Pekon dalam pelaksanaan kegiatan program BUM Pekon	1. Ikut serta dalam mengikuti kegiatan BUM Pekon 2. Pengambilan keputusan dalam menjalankan Program BUM Pekon.	Skor	a. (23,60 – 30,89); Tinggi b. (16,30 – 23,59); Sedang c. (9,00 – 16,29); Rendah
Tingkat partisipasi dalam penilaian	Anggota BUM Pekon melakukan evaluasi &	1. Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir	Skor	a. (15,00 – 19,49); Tinggi b. (10,50 –

Tabel 3. Lanjutan

dan evaluasi program	penilaian dalam kegiatan program	a. Memberikan penilaian terhadap laporan Program BUM Pekon.	14,99); Sedang (6,00 – 10,49); Rendah
Tingkat partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan BUM Pekon	Hasil yang dapat dirasakan oleh Anggota BUM Pekon maupun bagi desa dari kegiatan program BUM Pekon	1. Anggota BUM Pekon mendapatkan hasil dari program BUM Pekon sesuai dengan Tujuan 2. Keuntungan dari program BUM Pekon bagi desa	Skor a. (16,32 – 21,47); Tinggi b. (11,16 – 16,31); Sedang c. (6,00 – 11,15); Rendah

Variabel X dan Y diukur dengan menggunakan skor berkisar 1-3 dan diklasifikasikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan skor total pertanyaan pada kuesioner penelitian, selanjutnya data ordinal yang diperoleh akan diubah menjadi data interval dengan bantuan MSI (*Method Successive Interval*). Hasil pengukuran dari variabel penelitian akan diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi. Interval masing-masing klasifikasi ditentukan dengan rumus Sturges (Dajan, 1986) sebagai berikut:

$$Z = \frac{X - Y}{k}$$

Keterangan:

- Z = Interval Kelas  
 X = Nilai tertinggi  
 Y = Nilai terendah  
 k = Banyaknya kelas atau kategori

### 3.2 Penentuan Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*), di Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong. Pekon Parda Haga merupakan pekon yang memiliki BUM Pekon yang masih aktif dan program BUM Pekon sudah berjalan sejak tahun 2016 hingga sekarang. Pekon Parda Haga juga memiliki SDM yang banyak berperan aktif dalam kegiatan untuk memajukan pekon tersebut, salah satunya yaitu pembentukan BUM Pekon, selain itu BUM Pekon Parda Haga merupakan salah satu binaan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Lampung. Responden dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Pengurus BUM Pekon, dan anggota BUM Pekon yang tergabung dalam program BUM Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan yaitu pada bulan Maret-April 2021.

### 3.3 Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden menggunakan alat bantu kuisioner dengan menanyakan beberapa pertanyaan seperti identitas responden yang terdiri dari nama, umur pendidikan terakhir, dan nama anggota BUM Pekon serta pengetahuan masyarakat tentang Pengelolaan BUM Pekon Parda Haga. Data sekunder diperoleh dari literatur, laporan, studi pustaka, seperti jurnal, skripsi, dan data monografi desa serta instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Metode penelitian yang dipakai adalah metode survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data (Singarimbun dan Effendi, 2018). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.

Pada penelitian ini penentuan jumlah sampel dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Penentuan sampel yang pertama dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) karena peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil serta ada pertimbangan tertentu. Untuk sampel yang dipilih secara sengaja terdiri dari pemerintah pekon, pengelola BUM Pekon, dan Pengawas yang terlibat aktif dalam kegiatan BUM Pekon Parda Haga.
2. Penentuan sampel yang kedua menggunakan *proporsional random sampling*, sehingga semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Jumlah anggota BUM Pekon Parda Haga yaitu 317 orang terdiri dari suami dan istri yang ada di Pekon Parda Haga. Penentuan sampel pada penelitian ini merujuk pada rumus Slovin (dalam Riyanto dan Hatmawan, 2020) dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2S^2}{Nd^2 + Z^2S^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi anggota BUM Pekon (317 orang)

Z = Tingkat kepercayaan (90%=1,645)

S<sup>2</sup> = Variasi sampel (5%=0,05)

d = Derajat penyimpangan (5%=0,05)

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu 46 responden.

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2S^2}{Nd^2 + Z^2S^2} = n = \frac{(317)(1,645)^2(0,05)}{(317)(0,05)^2 + (1,645)^2(0,05)} = 46,14$$

$$\approx 46$$

### 3.4 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan



cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2012).

Metode analisis data dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Menggunakan metode analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan pertama dan kedua. Analisis deskriptif menurut Nawawi (1995) (dalam Mariyani, 2017) adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan ataupun melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas pada obyek yang diteliti secara objektif. Pada penelitian ini untuk menggambarkan peranan dari *stakeholders* (perangkat desa, pengurus BUM Pekon, dan masyarakat) dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon dengan mengumpulkan data melalui wawancara lebih mendalam menggunakan kuisisioner. Data yang diperoleh kemudian akan diolah dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Penulisan data dan informasi yang didapatkan selama penelitian ditujukan untuk mengevaluasi data. Hasil tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan yang terjadi selama melakukan pengamatan.
  - b. Data yang telah diperoleh kemudian dirumuskan ke dalam bentuk tabel untuk menghindari kesimpang siuran interpretasi serta sekaligus untuk mempermudah interpretasi data.
  - c. Kemudian, menghubungkan hasil penelitian yang diperoleh dengan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian, tujuannya untuk mencari arti atau memberi interpretasi yang lebih luas dari data yang diperoleh.
2. Uji statistika non parametrik *Rank Spearman* digunakan untuk menjawab tujuan ketiga menggunakan metode analisis korelasi *Rank Spearman*. Pengujian hipotesis menggunakan statistik non parametrik korelasi peringkat *Rank Spearman* dengan program SPSS 23.0 (*Statistical*

*Program for Sosial Science*). Alasan menggunakan korelasi peringkat *Rank Spearman* karena penelitian ini untuk mengukur ada tidaknya hubungan (korelasi) antara variabel X (faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program BUM Pekon) dengan variabel Y (tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program BUM Pekon) dengan skala ordinal (ranking). Rumus uji koefisien korelasi *Rank Spearman* (Siegel, 2011) adalah:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n^3}$$

Keterangan:

- $r_s$  = Penduga Koefisien Korelasi  
 $d_i$  = Perbedaan setiap pasangan rank  
 $n$  = Jumlah responden

Kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel di uji.
- b. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel di uji.

Korelasi berkisar antara -1, 0, +1, untuk melihat kategori keeratan hubungan maka dibuat tiga kategori antara 0-1 (korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 0 dan 0 sampai dengan +1), sehingga dapat dibuat tiga kategori diantaranya:

1. Kurang nyata (0,00 – 0,33)
2. Nyata (0,34 – 0,66)
3. Sangat nyata (0,67 – 1,00).

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan *stakeholders* (Pemerintah Pekon, Pengurus BUM Pekon, dan Pengawas) dalam pengelolaan BUM Pekon Parda Haga dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Peranan Pemerintah Pekon memberikan dukungan dalam bentuk penyertaan modal, memberikan masukan dan informasi terkait usaha BUM Pekon, pengawasan, pengkoordinir, dan penasehat operasional.
  - b. Peranan pengurus BUM Pekon sebagai pelaksana operasional, melakukan pencatatan keuangan dan menyusun laporan keuangan, melakukan pembagian keuntungan pada akhir tahun, dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pekon.
  - c. Peranan Pengawas yaitu melakukan pemilihan dan pengangkatan pengawas, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha, pelaksana pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pengurus, dan menyelenggarakan musyawarah/rapat umum pada akhir tahun.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon Parda Haga belum maksimal, karena kegiatan pengelolaan BUM Pekon masih didominasi oleh pengurus dan anggota yang diikutsertakan oleh pengurus, penyertaan modal dari masyarakat belum ada, dan evaluasi kegiatan masih kurang intensif.
3. Faktor-faktor yang berhubungan kurang nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat adalah umur, tingkat pendapatan, dan luas lahan garapan, yang

berhubungan nyata adalah tingkat pendidikan, dan yang berhubungan sangat nyata adalah motivasi anggota.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Pekon Parda Haga, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Peranan *stakeholders* (Pemerintah Pekon, Pengurus BUM Pekon, dan Pengawas) dalam pengelolaan BUM Pekon Parda Haga perlu ditingkatkan lagi diantaranya:
  - a. Pemerintah Pekon perlu meningkatkan alokasi penyertaan modal untuk usaha BUM Pekon melalui APB Pekon, dan mengarahkan serta memberikan nasehat kepada pengurus agar kinerja BUM Pekon dapat meningkat.
  - b. Pengurus BUM Pekon perlu mengembangkan unit usaha dengan memanfaatkan potensi di Pekon Parda Haga, melakukan pencatatan keuangan secara lebih intensif setiap ada pemasukan dan pengeluaran, melaporkan perkembangan usaha BUM Pekon kepada Pemerintah Pekon setiap bulan, dan membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun.
  - c. Pengawas perlu melakukan pengawasan secara intensif dengan cara melakukan rapat evaluasi setiap bulan untuk melihat kinerja pengurus dan perkembangan BUM Pekon.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara membuka unit usaha baru yang banyak melibatkan masyarakat dan mampu membantu dalam peningkatan pendapatan masyarakat, serta dapat memotivasi anggota masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan BUM Pekon.
3. Perwakilan masyarakat diharapkan dapat memilih orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha dan memiliki perhatian lebih terhadap usaha ekonomi pekon.

4. Melakukan sosialisasi secara intensif terkait fungsi dan peran BUM Pekon di tengah masyarakat melalui media sosial seperti forum-forum arisan, acara adat, dan acara seremonial yang diadakan oleh masyarakat Pekon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiya, R. 2014. Tingkat Partisipasi dan Efektivitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Posdaya Sauyunan. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Alkadafi, M. 2014. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju *Asean Economic Community* 2015. *Jurnal El-Riyasah* , Volume 5 No 1, Hal 32-40.
- Aldila, B., Dewangga N., dan Tubagus H.2018. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Peranan Pengurus Badan Usaha Milik Pekon di Pekon Gisting Bawah. *JIIA*. Volume 6 No 2.
- Andini, N. L. 2020. Analisis Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Paris Mandiri Di Desa Parit 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. *Skripsi*. UIN SUSKA RIAU.
- Azwar, P. Muljono dan T. Herawati. 2016. Persepsi dan Partisipasi Petani dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Penyuluhan*. Volume 12 No 2, Hal 157-167.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Jumlah Desa Berdasarkan Wilayah*. Jakarta (ID): BPS.
- BPS Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. 2020. *Kecamatan Lemong dalam Angka 2020*. Pesisir Barat. Lampung.
- Badra, V. M., T. Hasanuddin, M. Ibnu. 2011. Partisipasi Petani Padi Sawah Dalam Program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Universitas Lampung. Lampung*.
- Batubara, R., I. Effendi, dan R.T. Prayitno. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GMSK) di Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis (JIIA)*. Volume 4 No 1. Universitas Lampung.

- Chusnah, U. 2008. *Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dajan, A. 1986. *Pengantar Metode Statistik Jilid II*. LP3ES. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dewi, Amalia Sri Kusuma. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*. Volume V No. 1.
- Gitosaputro, S., dan K.K. Ranga. 2015. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori, dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hartomo dan Aziz A. 1990. *Ilmu Sosial Dasar*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Jamal, Z., A. Alaydrus, dan E. L. Dyastari. 2018. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 6 No 3, Hal 1361-1374. ISSN 2477-2458.
- Kasila, M., dan L.M. Kolopaking. 2018. Partisipasi Pemuda Desa dalam Perkembangan Usaha BUMDES “Tirta Mandiri” (Studi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*. Volume 2 No 1, Hal 43-48. ISSN: 2338-8021; E-ISSN: 2338-8269.
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Khadiyanto, P. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru*. Universitas Diponegoro. Semarang. ISBN: 979-704-476-9.
- Mantra, I. B. 2004. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mariyani, S., F. E. Prasmatiwati, R. Adawiyah. 2017. Ketersediaan Pangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Anggota Lumbung Pangan Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis (JIIA)*. Volume 5 No 3. Universitas Lampung.

- Maulidiawati, D., D. Nikmatullah, dan R.T. Prayitno. 2018. Partisipasi Petani dalam Program Upsus Pajale di Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi (JIIE)*. Volume 6 No 1. Universitas Lampung.
- Mikkelsen. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya pemberdayaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Mokoagow, H., M. Audrey, dan M. Martha. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam BUMDES di Desa Bulawan II Kecamatan Kotabunan Kabupaten Boolang Mongondow Timur. *Jurnal AGRIRUD*. Volume 2 No 1, Hal 45-54.
- Mubarra, A. 2020. *Damar Mata Kucing, Keberhasilan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat*. <http://www.medianasionalid/damar-mata-kucing-keberhasilan-pengelolaan-hutan-berkelanjutan-berbasis-masyarakat/>. Diakses pada 15 Juni 08.16 WIB.
- Mutolib, A., D. Nikmatullah, I. Effendi, B. Viantimala, dan A. Rahmad. 2019. Kontribusi Dana desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *JSHP*. Volume 3 No 1. Universitas Lampung.
- Nasution, Z. 2009. *Solidaritas Sosial Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang: UMM Pers.
- Ndraha, M. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 26 Tahun 2015. Tentang Pedoman Pengangkatan Aparatur Pemerintah Pekon Kabupaten Pesisir Barat.
- Peter, S., dan Yenny, S. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Putra, A.S. 2015. *Badan Usaha Milik Desa : Sprit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta (ID) : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
- Prasetyo, R.A. 2016. Peranan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, Volume 11 No 1, Hal 86-100.
- Pratiwi, E., I.N. Sujana, dan A.I. Haris. 2019. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDes Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. Volume 11 No 1. p- ISSN : 2599 – 1418. e-ISSN : 2599 – 1426.



- Ramadana, C B., H. Ribawanto, Suwondo. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1 No 2, Hal 1068-1076.
- Rangga, K.K., dan Y. A. Syarif. 2017. Paddy Farmer Households' Participation and Food Security Level in Special Effort Program in Seputih Raman Sub-district of Central Lampung Regency. *IOP Confrence Series: Earth and Enviromental Science*. Volume 142, Hal 1-5.
- Riyanto, S., dan Aglis Andhita Hatmawan. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Rizqi, H A., S. Gitosaputro, dan S. Silviyanti. 2019. Partisipasi Anggota Kelompok Tani dalam Program Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (UPSUS PAJALE) di Kecamatan Metro Barat Kota Metro. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. Volume 7 No 1. Universitas Lampung.
- Siegel, S. 2011. *Statistik Non Parametrik*. PT Gramedia. Jakarta.
- Singarimbun, M., dan Effendi S. 2018. *Metode Penelitian Survei (Edisi Revisi)*. PT Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- Soekanto, S. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Soemarto, dan Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono . 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhardono, E. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Program Inovatif dan Partisipasi di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Tjokroamidjojo, B. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Uphoff, C. JM., Goldsmith, AA. 1979. *Development Commite : Feasibility and Application of Rural Development Participation*. *State-of-the-Arth Paper*. New York (AS): Cornell University.

Undang-Undang (UU). 2014. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta (ID): UU NKRI

Wijanarko, A. S. 2012. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pandan Krajan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto (SKRIPSI). Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.

Yama, I. M. T., S. Gitosaputro, dan T. Hasanuddin. 2018. Partisipasi Petani Padi dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis(JIIA)*. Volume 6 No 1.

Yulizar, Agus H., Nandi K. 2014. Konservasi Damar Mata Kucing (*Shorea javanica*) Berbasis Masyarakat Zona Tradisional Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Media Konservasi*. Volume 19 No 2 Hal. 73-80.